

Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan

Selasa, 04-08-2015

Makassar – Muktamar Muhammadiyah ke 47 setelah dibuka Presiden RI Jokowi di Lapangan Karebosi kemarin (3/8) di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulsel dilanjutkan dengan Sidang Pelno pertama yakni pidato iftitah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, di Gedung Abad Kedua Muhammadiyah, Universitas Islam Muhammadiyah Makassar, Din membacakan pidato Iftitah, dengan tema Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan, Refleksi, dan Rekomendasi.

Mengawali pidatonya, Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa setelah Muktamar ke-46 di Yogyakarta tahun 2010, gerakan Pencerahan Muhammadiyah berlangsung cukup dinamis. "Banyak cabang dan ranting yang didirikan, selain itu amal usaha baru juga banyak didirikan terutama dalam bidang kesehatan." Ungkap Din Syamsuddin

Sejak 2011 Muhammadiyah melancarkan gerakan amar ma'ruf nahi munkar baru yaitu Jihad Konstitusi. Beberapa undang-undang yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Ormas, UU Rumah Sakit yang berhubungan dengan kepentingan Muhammadiyah.

"Alhamdulillah sebagian besar permohonan Muhammadiyah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jihad konstitusi untuk meluruskan kiblat bangsa tidak boleh berhenti.", terangnya.

Muhammadiyah sejatinya adalah gerakan kebudayaan, bukan gerakan politik-kekuasaan. Sebagai konsekuensi logis, Muhammadiyah terlibat dalam politik moral. Pada Muktamar 1971 di Makassar, Muhammadiyah menegaskan khittah politiknya bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

Pada akhirnya Muhammadiyah akan tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural, berorientasi pada politik amar ma'ruf nahi munkar,

"Pendekatan politik Muhammadiyah adalah politik tinggi (*high politics*) yaitu politik adiluhung sebagai kekuatan efektif meluruskan kiblat bangsa," tutup Din. (mona) (dzar)